

### **BAB III**

## **KEBIJAKAN AMERIKA SERIKAT MENDUKUNG REZIM HAMAD BIN ISA AL-KHALIFA DALAM KONFLIK BAHRAIN**

### **3.1 Struktur Pengambilan Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat**

Proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan luar negeri Amerika Serikat melibatkan tiga lembaga pemerintahan yakni, eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta melibatkan berbagai institusi atau agensi yang ruang lingkupnya lebih kompleks, seperti Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Departemen Pertahanan, *National Security Agency*, *National Security Council*, *Central Intelligence Agency*, dan lain-lain.<sup>90</sup>

Mekanisme pengambilan kebijakan luar negeri Amerika Serikat memiliki perbedaan dengan pembuatan kebijakan dalam negeri atau domestik, ditengah proses pengambilan keputusan luar negeri, pembuatnya lebih memperhatikan beberapa aspek penting, yakni meletakkan otoritas presiden lebih besar, pengaruh kongres lebih terbatas dan lebih mengesampingkan masukan dari kelompok kepentingan domestik.<sup>91</sup>

Presiden memiliki otoritas yang lebih tinggi karena, presiden memiliki lebih banyak informasi dari berbagai pihak seperti *Central Intelligence Agency*, *National Security Council*, *National Security Agency*, serta Departemen Luar

---

<sup>90</sup> Politik Luar Negeri Amerika Serikat, diakses dalam <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/12010/F.%20BAB%20II.pdf?sequence=6&isAllowed=y> (24/032018, 09.45 WIB).

<sup>91</sup> Singh, Robert (2003). *American Government and Politics*, London: SAGE Publications, Ltd. Chapter 12. Hal. 266. Terdapat dalam artikel “Proses Pembuatan Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat” oleh Doni Sunendra, Erdita Vega, Lukas Jalu.

Negeri, sehingga informasi serta kondisi eksternal dari Amerika Serikat menjadi kunci bahwa dalam pengambilan kebijakan luar negeri, otoritas presiden lebih tinggi dibandingkan kongres.<sup>92</sup>

Selain itu konstitusi Amerika Serikat juga memiliki pengaruh besar dan penting terhadap proses pengambilan kebijakan luar negeri, hal ini disebabkan karena di dalam konstitusi telah diatur mengenai tujuan utama dari kebijakan luar negeri Amerika Serikat adalah untuk mencapai kepentingan nasionalnya (*national interest*) yakni, untuk membangun dan mempertahankan sebuah dunia yang lebih demokratis, aman dan sejahtera untuk kepentingan rakyat Amerika Serikat serta masyarakat internasional.<sup>93</sup>

Adapun pembagian wewenang Kongres dan Presiden dalam pengambilan kebijakan luar negeri terdapat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.1 Pembagian Wewenang Dalam Kebijakan Luar Negeri<sup>94</sup>

Wewenang Presiden	Wewenang Kongres
Presiden sebagai komando tertinggi pasukan bersenjata.	Kongres memiliki wewenang untuk mendeklarasikan perang.
Presiden dapat menegosiasikan perjanjian.	Kongres dapat meratifikasi atau menolak perjanjian (Senat).
Presiden dapat mencalonkan duta besar dan kunci-kunci penting dalam pembuatan kebijakan luar negeri seperti pemimpin Departemen Luar Negeri, Departemen Pertahanan CIA	Kongres mempunyai wewenang untuk menyetujui atau menolak pencalonan duta besar dan kepala-kepala dari instansi dibawah lembaga eksekutif.
Presiden dapat menerima representasi dari pemerintah lain.	Kongres dapat meningkatkan dan mendukung angkatan bersenjata serta kapabilitas militer melalui peningkatan belanja anggaran militer.

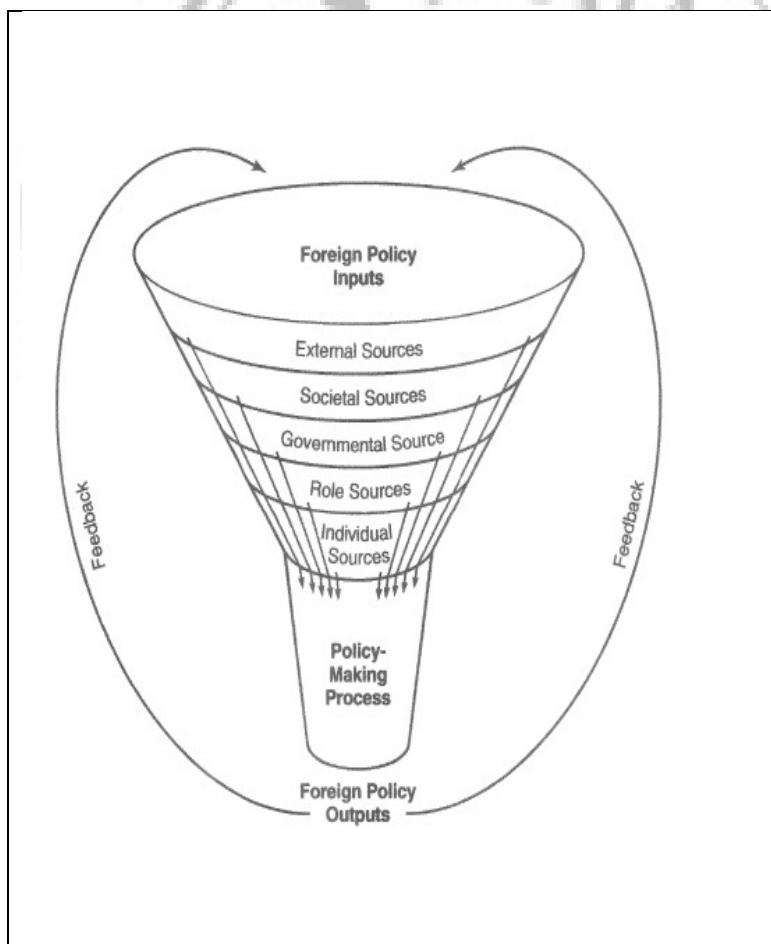
<sup>92</sup> *Ibid.*, hal. 268.

<sup>93</sup> Storey Wil. (2007). *US Government and Politics Politic Studi Guides*, (Edinburgh), Edinburgh University Press, hal. 313. Terdapat dalam artikel "Proses Pembuatan Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat" oleh Doni Sunendra, Erdita Vega, Lukas Jalu.

<sup>94</sup> Singh, Robert (2003). *American Government and Politics*, London: SAGE Publications, Ltd. Chapter 12. Hal. 269. Terdapat dalam artikel "Proses Pembuatan Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat" oleh Doni Sunendra, Erdita Vega, Lukas Jalu.

Proses pengambilan kebijakan luar negeri Amerika Serikat melibatkan berbagai sumber yang saling terkait satu sama lain dan hal ini yang menyebabkan pembuatan kebijakan luar negeri lebih bersifat kompleks, sebagaimana kerangka analisis yang telah dibuat oleh Eugene yang dibagi menjadi ; *eksternal source, societal sources, governmental sources, role sources, individual sources*.<sup>95</sup>

Tabel 3.2 Kerangka Pengambilan Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat



<sup>95</sup> Eugene R. Wittkopf; Christoper M Jones; Charles W Kegley, Jr., (2003). *American Foreign Policy Pattern and Process*. Belmont: Thomson Wadsworth. Hal. 132. Terdapat dalam paper “Proses Pengambilan Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat”.

- a) *External Sources*, merupakan pengaruh dari aktor-aktor non negara dalam sistem internasional yang memiliki peran sehingga dapat mempengaruhi pengambilan kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Aktor non negara ini dapat berupa I-NGO (*International-Non Government Organization*) maupun MNC (*Multi National Corporation*). Sumber eksternal juga dapat berupa permasalahan yang terjadi di dunia internasional atau perilaku dari aktor-aktor internasional yang mempengaruhi kebijakan luar negeri Amerika Serikat.
- b) *Societal Sources*, diartikan sebagai dua variabel yaitu opini publik dan politik dalam negeri yang dapat mempengaruhi pembuatan kebijakan itu sendiri, hal ini menjadi sangat penting karena politik luar negeri merupakan perpanjangan tangan dari kepentingan nasional yang ingin dicapai suatu negara.
- c) *Governmental Sources*, yakni sumber-sumber dari pemerintahan, yang merupakan aspek-aspek dari struktur pemerintah yang membatasi atau menambah pengaruh dalam pembuatan kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Sebagai contoh, *Central Intelligence Agency* (CIA), dan Departemen Luar Negeri memiliki informasi penting terkait pembuatan kebijakan luar negeri.
- d) *Role Sources*, dalam proses pembuatan kebijakan luar negeri terdapat peran-peran penting, karena pembuat keputusan dipengaruhi oleh tingkah laku sosial dan norma-norma yang berlaku dalam peran yang dipegang

oleh seseorang. Posisi pembuat keputusan dapat memberikan pengaruh terhadap masukan bagi kebijakan luar negeri Amerika Serikat.

- e) *Individual Sources*, karakteristik seorang pembuat kebijakan dapat menentukan arah dari kebijakan luar negeri Amerika Serikat, hal ini dikarenakan di dalam proses pembuatan kebijakan sifat dari presiden dapat mempengaruhi keputusan-keputusan dalam proses perumusan kebijakan luar negeri.<sup>96</sup>

### 3.2 Struktur Pemerintahan Amerika Serikat

Sistem pemerintahan Amerika Serikat di dasarkan pada konstitusi (Undang-undang Dasar) tahun 1787. Namun, konstitusi tersebut telah mengalami beberapa kali amandemen. Amerika Serikat memiliki tradisi demokrasi yang kuat dan berakar dalam kehidupan masyarakat sehingga kerap dianggap sebagai benteng demokrasi dan kebebasan. Sistem pemerintahan yang diterapkan ialah demokrasi dengan sistem presidensial. Sistem presidensial inilah yang kemudian menjadi contoh sistem pemerintahan di negara-negara lain, meskipun telah mengalami banyak pembaharuan sesuai dengan latar belakang negara yang bersangkutan.

Pokok-pokok sistem pemerintahan Amerika Serikat adalah ;

- a) Amerika Serikat adalah negara republik dengan bentuk federasi (federal) yang terdiri atas 50 negara bagian. Pusat pemerintahan (federal) berada di Washington dan pemerintahan negara bagian (state). Adanya pembagian kekuasaan untuk pemerintah federal yang memiliki kekuasaan yang di

---

<sup>96</sup> *Ibid.*, hal. 133.

delegasikan konstitusi. Pemerintah negara bagian memiliki semua kekuasaan yang tidak didelegasikan kepada pemerintah federal.

- b) Adanya pemisahan kekuasaan, eksekutif, legislatif dan yudikatif. Antara ketiga tersebut *check and balance* sehingga tidak ada yang terlalu menonjol.
- c) Kekuasaan eksekutif dipegang oleh presiden. Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dalam satu paket. Dengan demikian presiden tidak bertanggungjawab terhadap kongres tetapi kepada rakyat.
- d) Kekuasaan legislatif berada pada parlemen yang disebut kongres. Kongres terdiri dari 2 bagian (bikameral), yaitu Senat dan Badan Perwakilan (*The House of Representative*). Anggota Senat adalah perwakilan dari tiap negara bagian yang dipilih langsung melalui pemilu oleh rakyat di negara yang bersangkutan. Tiap negara bagian punya 2 perwakilan. Jadi, terdapat 100 Senator yang terhimpun dalam *The Senate of United State*. Masa jabatan Senat ialah 6 tahun. Akan tetapi dua pertiga anggotanya diperbaharui tiap 2 tahun. Badan perwakilan merupakan perwakilan dari rakyat Amerika Serikat yang dipilih langsung dengan masa jabatan 2 tahun.
- e) Kekuasaan Yudikatif, berada pada Mahkamah Agung (*Super Court*) yang bebas dari pengaruh badan lembaga lainnya. Mahkamah Agung menjamin, tegaknya kebebasan, kemerdekaan individu, dan hukum.

- f) Sistem Kepartaian, menganut dwipartai (bipartai), Partai Demokrat dan Partai Republik. Kedua partai ini saling berebut posisi pada saat pemilu.
- g) Sistem pemilu menganut sistem distrik, pemilu sering dilakukan di Amerika Serikat. Pemilu di tingkat federal, misalnya pemilu untuk memilih presiden dan wakil presiden, pemilihan anggota senat, dan pemilihan badan perwakilan. Di tingkat negara bagian, pemilu untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur, pemilu untuk anggota senat dan badan perwakilan negara bagian. Disamping itu terdapat pemilu untuk memilih wali kota/dewan kota serta jabatan publik yang lainnya.
- h) Sistem pemerintahan negara bagian memiliki prinsip yang sama dengan pemerintahan federal. Tiap negara bagian dipimpin oleh gubernur dan wakil gubernur sebagai badan eksekutif. Ada parlemen yang terdiri atas dua badan, Senat mewakili daerah yang lebih rendah setingkat kabupaten, dan badan perwakilan sebagai perwakilan rakyat negara bagian.<sup>97</sup>

Pada pasal 1 ayat 1 **tentang legislatif** dijelaskan bahwa semua kuasa legislatif diberikan pada Kongres Amerika Serikat yang terdiri dari Senat dan *House of Representative* (DPR).<sup>98</sup> Konstitusi pasal 1 menjelaskan bahwa Kongres memiliki kuasa urusan luar negeri yakni, mengatur perdagangan dengan negara asing, menyatakan perang, meningkatkan dan memfasilitasi tentara, dan membuat peraturan untuk angkatan darat dan angkatan laut. Kongres juga berwenang

---

<sup>97</sup> Sistem Pemerintahan Amerika Serikat Atas Konstitusi, diakses dalam <https://www.scribd.com/doc/72783430/Sistem-Pemerintahan-Amerika-Serikat-an-Atas-Konstitusi> (24/03/2018, 10.11 WIB).

<sup>98</sup> *The Constitution of The United States, The Bill of Rights and All Amandement*, diakses dalam <http://constitutionus.com/> (24/03/2018, 12.22 WIB).

luas untuk melakukan investigasi dalam kebijakan luar negeri atau masalah keamanan nasional tertentu. Kongres juga memiliki kekuatan untuk menciptakan, menghilangkan atau merestrukturisasi lembaga eksekutif yang sering dilakukan setelah ada konflik besar atau krisis.<sup>99</sup>

**Konstitusi juga memberikan Senat** peran khusus dalam kebijakan luar negeri untuk memberikan saran kepada presiden terhadap negosiasi, memberi izin terhadap kesepakatan tersebut, dan menyetujui pengangkatan Presiden, Menteri Luar Negeri, Pejabat dari Departemen Luar Negeri, Duta Besar, dan lain-lain.<sup>100</sup>

**Dalam pasal 2 Konstitusi menjelaskan bahwa lembaga eksekutif** yang dipimpin oleh presiden sebagai kepala pemerintahan, Presiden bertugas merumuskan kebijakan luar negeri, mengawasi pelaksanaannya, dan berupaya mendapatkan sumber daya guna mendukung kebijakannya tersebut. Presiden mengatur dan menunjuk departemen dan agensi memainkan peran dalam proses kebijakan luar negeri.<sup>101</sup>

Sedangkan dalam pasal 3 ayat 1, dalam **Konstitusi Amerika Serikat dijelaskan bahwa kekuasaan peradilan Amerika Serikat** hanya tertuju pada satu Mahkamah Agung. Tugas Mahkamah Agung yakni, memberlakukan dan menafsirkan hukum ketika memutuskan sengketa hukum dipengadilan federal.<sup>102</sup>

---

<sup>99</sup> *US Foreign Policy Power: Congress and The President*, diakses dalam <https://www.cfr.org/backgrounder/us-foreign-policy-powers-congress-and-president> (24/03/2018, 13.02 WIB).

<sup>100</sup> Hubert, Humprey. *The Senate in Foreign Policy*, diakses dalam <https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/1959-07-01/senate-foreign-policy> (24/03/2018, 13.42 WIB).

<sup>101</sup> *Foreign Policy Association, How US Foreign Policy Is Made*, diakses dalam [http://www.fpa.org/features/index.cfm?act=feature&announcement\\_id=45&show\\_sidebar=0](http://www.fpa.org/features/index.cfm?act=feature&announcement_id=45&show_sidebar=0) (24/03/2018, 15.27 WIB).

<sup>102</sup> About America: The Constitution of The United States of America with Explanatory Notes (Adapted From The World Book Encyclopedia (C) 2004 World Book, Inc.). Hal. 4.



Kekuasaan yudikatif bebas dari pengaruh dua badan lainnya. Dan Mahkamah Agung menjamin berdirinya kebebasan dan kemerdekaan individu, serta tegaknya hukum di Amerika Serikat. Kuasa yang paling mendasar Mahkamah Agung ialah *judicial review* atau kemampuan untuk menyatakan bersalah atau tidaknya tindakan yang dilakukan oleh lembaga legislatif atau eksekutif. *Judicial review* berperan penting guna memastikan lembaga pemerintah untuk mengakui batas-batas kekuasaannya masing-masing tanpa ada yang melanggar konstitusi.<sup>103</sup> Mahkamah Agung juga memiliki wewenang untuk membatalkan Undang-undang atau mencegah tindakan eksekutif apabila dinilai melanggar konstitusi. Dalam hal ini, dibandingkan dengan lembaga eksekutif dan legislatif, lembaga yudikatif memiliki peran terbatas dalam kebijakan luar negeri.

### **3.3 Aktor-aktor dalam Proses Pengambilan Kebijakan**

#### **3.3.1 Menteri Luar Negeri, Wakil Presiden, Menteri Pertahanan, Juru**

##### **Bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat**

Juru bicara Departemen Luar Negeri AS, **Victoria Nuland** menjelaskan bahwa Bahrain sementara telah melakukan “beberapa langkah penting yang dianggap menuju reformasi,” masih banyak lagi yang harus dilakukan. Namun, beliau juga mengatakan, kapasitas militer Bahrain juga dinilai menjadi “unsur penting” janji Amerika Serikat untuk melindungi dan memepertahankan keamanan wilayah Teluk.<sup>104</sup> Berbagai keputusan yang diambil oleh Amerika

---

<sup>103</sup> *About the Supreme Court*, diakses dalam <http://www.uscourts.gov/about-federal-courts/educational-resources/about-educational-outreach/activity-resources/about> (24/03/2018, 16.45 WIB).

<sup>104</sup> *News Republika, AS Jual Senjata Lagi, Rakyat Bahrain Kecewa*, diakses dalam <http://internasional.republika.co.id/berita/internasional/global/17/04/03/internasional/global/12/05/14/m3zf4s-as-jual-senjata-lagi-rakyat-bahrain-kecewa> (19/10/2017, 03.11 WIB).

Serikat, banyak dilakukan pasca kunjungan Putra Mahkota Bahrain Salman Hamad Al-Khalifa ke Washington pada awal 2012, untuk bertemu dengan **wakil Presiden Joe Biden, Menteri Luar Negeri Hillary Clinton, dan Menteri Pertahanan Leon Panetta.**

Dalam laman media irib juga menegaskan, bahwa AS berupaya keras untuk mempertahankan rezim Bahrain agar tetap berkuasa. Sedangkan, untuk mengalihkan hal tersebut terhadap publik dunia. **Hillary Clinton sebagai Menteri Luar Negeri** yang menjabat pada masa itu, meminta Pangeran Mahkota Bahrain untuk mengambil langkah nyata sebagai upaya mendorong reformasi mendasar di negara Teluk tersebut.<sup>105</sup>

Namun, realitanya ditengah kesibukan Amerika menyerukan Rezim Al-Khalifa untuk melangsungkan tindakan reformasi mendasar. Rezim Bahrain justru semakin meningkatkan tindakan represif, bahkan beberapa bulan pasca kunjungan Pangeran Mahkota Bahrain ke Washington, Rezim Bahrain telah melakukan banyak penangkapan terhadap para aktivis Hak Asasi Manusia dan menyiksanya dengan membawa alasan karena, telah memprovokasi banyak warga untuk menentang pemerintahan. Namun anehnya, Amerika Serikat hanya bersikap pasif dalam merespon pelanggaran Hak Asasi Manusia tersebut.<sup>106</sup>

Melalui Departemen Luar Negeri Amerika Serikat yang merupakan eksekutif senior Departemen Pemerintah Amerika Serikat. Lembaga ini memiliki tugas sebagai penasihat utama Presiden mengenai kebijakan luar negeri Amerika

---

<sup>105</sup> *Kunjungan Pangeran Mahkota Bahrain ke Amerika dan Restu Washington*, diakses dalam [http://indonesian.tribe.ir/editorial/fokus/item/44158-Kunjungan\\_Pangeran\\_Mahkota\\_Bahrain\\_ke\\_Amerika\\_dan\\_Restu\\_Washington](http://indonesian.tribe.ir/editorial/fokus/item/44158-Kunjungan_Pangeran_Mahkota_Bahrain_ke_Amerika_dan_Restu_Washington) (25/03/2018, 08.16 WIB).

<sup>106</sup> *Ibid.*,

Serikat.<sup>107</sup> Pada Oktober 2011, presiden sempat menangguhkan pasokan senjata kepada Bahrain sebagai respon atas kekerasan terhadap demonstrasi di Bahrain. Hal ini dilakukan hingga menunggu hasil penyelidikan lokal terkait pelanggaran Hak Asasi Manusia sejak pecahnya aksi protes warga Bahrain yang anti pemerintah diawal Februari 2011.<sup>108</sup>

Meskipun Amerika Serikat berinisiatif membekukan pasokan senjata ke Bahrain. Namun, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat pada Mei 2012 menyatakan secara resmi bahwa penjualan senjata dan peralatan militer ke Bahrain mulai berlanjut kembali.<sup>109</sup> Hal ini menunjukkan bahwa sikap Departemen Luar Negeri Amerika Serikat terhadap konflik Bahrain justru membawa kesan untuk menyokong rezim Bahrain, mengingat pengumuman yang dilakukan Deplu Amerika Serikat terjadi ditengah memuncaknya pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi di Bahrain.

Sikap tersebut tentu memiliki landasan untuk melindungi kepentingan Amerika Serikat. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengatakan bahwa pengiriman senjata bermaksud untuk membantu Bahrain “mempertahankan kemampuan pertahanan eksternalnya”. Beberapa kapal fregat dan kapal penjaga pantai akan dipasok, bersama dengan mesin yang telah diupgrade untuk pesawat F-16. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengatakan pesanan untuk

---

<sup>107</sup> *U.S Department of State, Diplomacy in Action. Secretary of State.* Diakses dalam <https://www.state.gov/secretary/2017/index.htm> (25/03/2018, 10.05 WIB).

<sup>108</sup> *AS Tangguhkan Kontrak Militer dengan Bahrain*, diakses dalam <http://parstoday.com/id/news/world-i22177-as-tangguhkan-kontrak-militer-dengan-bahrain> (18/10/2017, 17.34 WIB).

<sup>109</sup> *Ibid.*,

kendaraan semua medan Humvee dan jenis rudal yang dipandu kawat baru tidak diikutsertakan.<sup>110</sup>

Namun, menurut salah seorang pengamat Matar, yang merupakan juru bicara partai Al-Wefaq yang notabene-nya sebagai pihak oposisi di Bahrain, beliau mengatakan mayoritas rakyat Bahrain tidak menyetujui rencana Amerika untuk memulai penjualan senjata lagi ke negara mereka. “Warga Bahrain kecewa dengan keputusan ini. Situasinya berubah dari buruk menjadi lebih buruk. Kesepakatan penjualan senjata ini akan diartikan oleh pemerintah Bahrain sebagai lampu hijau untuk melanjutkan penangkapan-penangkapan itu,” ujarnya.<sup>111</sup> Mendengar pendapat dari juru bicara Al-Wefaq tersebut, kebijakan Amerika Serikat terhadap Bahrain yang bertujuan membantu menjaga kemampuan Bahrain dari ancaman asing, dapat dinilai pernyataan itu digunakan sebagai dalih demi menutupi tujuan yang sebenarnya untuk membantu rezim Bahrain mempertahankan posisinya dari ancaman pihak oposisi.

### 3.3.2 Sekretaris Pertahanan, Sekretaris Pers Pentagon, Laksamana

#### Angkatan Laut AS

Pasca meletusnya gelombang revolusi Bahrain diawal 2011, **Sekretaris Pertahanan** Robert M Gates, mengunjungi Bahrain pada tanggal 11 Maret 2011 untuk mendesak dialog dan proses reformasi dalam menanggapi demonstran di negara Bahrain. **Sekretaris Pers Pentagon**, Geoff Morrell juga mengatakan pentingnya terlibat dengan Raja Hamad bin Isa Al-Khaifa dan Putra Mahkota

---

<sup>110</sup> BBC News, *US resumes some Bahrain arms sales for 'external defence'*, diakses dalam <http://www.bbc.com/news/world-middle-east-18039035> (18/10/2017, 01.39 WIB).

<sup>111</sup> VOA, *Penjualan Senjata Amerika ke Bahrain Ditentang Keras*, diakses dalam [https://www.voaindonesia.com/a/penjualan\\_senjata\\_amerika\\_ke\\_bahrain\\_ditentang\\_keras/566383.html](https://www.voaindonesia.com/a/penjualan_senjata_amerika_ke_bahrain_ditentang_keras/566383.html) (18/10/2017, 01.58 WIB).

Salman bin Hamad bin Isa Al-Khalifa mengenai situasi yang terjadi di Bahrain dan wilayahnya.<sup>112</sup>

Gates memiliki dua pesan, yang disampaikan oleh **Sekretaris Pers Pentagon, Morrell** yang mengungkapkan, tersedia sebuah jaminan dari dukungan kami, serta upaya dialog nasional, yang masih dalam tahap. Salah seorang pejabat senior Pertahanan yang mendampingi Gates juga mengatakan terhadap wartawan saat perjalanan ke Bahrain, bahwa Bahrain merupakan mitra strategis yang penting, keduanya merupakan rumah bagi Armada Militer Kelima Angkatan Laut AS dan sebagai keseimbangan regional yang penting bagi Iran, ungkap pejabat tersebut.<sup>113</sup>

Pernyataan serupa juga diungkapkan oleh salah seorang **Laksamana Angkatan Laut Amerika Serikat yang menjabat sebagai ketua Kepala Staf Gabungan (2007-2011), oleh Mike Mullen.**<sup>114</sup> Beliau antusias memuji keputusan Putra Mahkota Bahrain, yang mulai membuka dialog nasional dalam mengatasi krisis politik yang terjadi di negara Teluk tersebut. Mullen berfikir, bahwa kedua kubu tersebut memastikan bahwa tindakan kekerasan akan segera berhenti. Dan tetap akan diadakan evaluasi mengenai hal tersebut. Mullen menegaskan bahwa, Bahrain adalah sekutu lama yang kritis dan menjadi tuan rumah Armada Kelima

---

<sup>112</sup> Karen Parrish, U.S Department of Defense “*Gates Visits Bahrain to Urge Reform Dialogue*” diakses dalam <http://archive.defense.gov/news/newsarticle.aspx?id=63132> (30/10/2017, 17.28 WIB).

<sup>113</sup> *Ibid.*,

<sup>114</sup> *Encyclopedia Britannica*, diakses dalam <https://www.britannica.com/biography/Mike-Mullen> (01/11/2017, 15.36 WIB).

Angkatan Laut Amerika Serikat, ucap beliau dan menambahkan bahwa ia melihat hubungan itu akan berlanjut di masa depan.<sup>115</sup>

Dalam laman media Islam Times juga ikut memaparkan bahwa, Departemen Pertahanan Amerika Serikat, menegaskan bahwa Washington tengah melakukan pemantauan terkait perkembangan krisis yang sedang terjadi di Bahrain, yang merupakan Markas Besar Armada Angkatan Laut Kelima Amerika Serikat yang juga memiliki pasukan sekitar 4.200 tentara Amerika Serikat di sana.<sup>116</sup>

Departemen Pertahanan Amerika Serikat juga termasuk pihak yang terlibat dalam pengambilan kebijakan Amerika Serikat dalam menyikapi konflik di Bahrain. Lembaga ini memiliki misi untuk menyediakan kekuatan militer yang dibutuhkan untuk mencegah perang dan melindungi keamanan nasional Amerika Serikat. Kantor pusat departemen ini berada di Pentagon.<sup>117</sup>

Dengan demikian, Departemen Pertahanan Amerika Serikat membawa pesan akan pentingnya melindungi instrumen pertahanan Amerika Serikat yang berada di Bahrain. Penting untuk diketahui bahwa, salah satu basis Armada Militer Angkatan Laut paling penting di dunia yang terletak tidak jauh dari lokasi demonstrasi rakyat Bahrain. Pada 2011 saja, Amerika sudah memiliki lebih dari 2.000 pasukan militer di markas Armada Kelima. Memiliki ribuan pendukung kontraktor yang bekerja di fasilitas komando seluas 100 hektar di pinggiran kota

---

<sup>115</sup> Donna Milles, *U.S., Allies Monitor Libya Situation, Mullen Says*. Diakses <http://archive.defense.gov/news/newsarticle.aspx?id=62925> (01/11/2017, 15.57 WIB).

<sup>116</sup> *AS Dukung Penindasan di Bahrain*, diakses dalam <http://islamtimes.org/id/doc/news/55330/> (01/11/2017, 17.03 WIB).

<sup>117</sup> *US. Departement of Defense*, diakses dalam <https://www.defense.gov/Leaders/Secretary-of-Defense/> (17/10/2017, 23.00 WIB).

Jaffair, ibukota Manama. Jika termasuk keluarga mereka, maka komunitas militer AS di Bahrain melebihi 6.000 orang.<sup>118</sup>

Tabel 3.3 Letak Armada Militer Kelima Angkatan Laut AS



Angkatan Laut Amerika Serikat pertama kali menggunakan pelabuhan Bahrain, sejak tahun 1940an dan pada 1950 mulai menyewa kantor pusat di Inggris.<sup>119</sup> Keberadaan Armada Militer Amerika Serikat yang tidak bisa dianggap remeh ini. Ternyata berfungsi untuk melakukan patroli di wilayah perairan Timur Tengah dan Asia Tengah.

Adapun rincian penting mengenai Armada Militer Angkatan Laut Kelima Amerika Serikat yakni sebagai berikut :

<sup>118</sup> Dr. Richard Weitz, *The US. Military and Bahrain*, diakses dalam <http://www.sldinfo.com/the-u-s-military-and-bahrain/> (03/11/2017, 23.48 WIB).

<sup>119</sup> *Ibid.*,

- a) Panglima Armada Militer Kelima AS menguasai sekitar 2,5 juta mil persegi wilayah perairan, yakni Laut Merah, Teluk Oman dan sebagian Samudra Hindia.
- b) Beberapa negara seperti, Afganistan, Bahrain, Mesir, Iran, Irak, Yordania, Kazakhstan, Kirgistan, Lebanon, Oman, Pakistan, Qatar, Arab Saudi, Suriah, Tajikistan, Turkmenistan, Uni Emirat Arab, Uzbekistan, dan Yaman, dibawah naungan armada AS.
- c) Beberapa kapal induk, kapal perusak dan kapal lain yang secara *rotationally* digunakan dari AS, beserta kapal kecil berbasis di Teluk untuk jangka panjang merupakan bagian dari pelengkap Armada Kelima.
- d) Fungsi kuat Armada Kelima digunakan untuk melindungi jalur pelayaran Teluk dan perairan di sekitarnya. Dan merupakan bagian penting dari Angkatan Laut Komando Pusat yang bertanggung jawab menangani perang di Afganistan dan Irak, dan memiliki misi tempur dikedua negara dengan menggunakan pesawat mereka.
- e) Terdapat sebanyak 4.500 staf militer dan sipil Amerika Serikat bekerja di pelabuhan dan pangkalan di Bahrain yang terletak di Juffairare, sekitar lima mil sebelah Tenggara ibukota Manama.<sup>120</sup>

Meskipun Amerika menyadari bahwa kebijakan represif yang dilakukan rezim Bahrain begitu nyata dan tidak adil. Namun, berbagai aktor kepentingan di Amerika Serikat terlihat enggan mengutuk secara tegas, baik dari pihak

---

<sup>120</sup> Factbox: U.S Navy's Fifth Fleet, based in Bahrain. Diakses dalam <http://www.reuters.com/article/us-bahrain-fleet/factbox-u-s-navys-fifth-fleet-based-in-bahrain-idUSTRE71G5QH20110217> (04/11/2017, 17.25 WIB).



Departemen Luar Negeri maupun Departemen Pertahanan. Mereka terkesan lunak dan pasif, hal ini tentu mengundang berbagai pertanyaan. Keengganan AS untuk bersikap tegas terhadap Bahrain, diyakini karena Amerika Serikat membutuhkan Bahrain untuk membantu mempertahankan stabilitas regional dan melindungi produsen minyak ramah di Teluk Persia.<sup>121</sup> Kepentingan ini tentu, mendorong Amerika Serikat untuk bersikeras melindungi Armada Militer Kelima dari berbagai ancaman.

### 3.3.3 Kelompok Hak Asasi Manusia Internasional, Kelompok Kontrol

**Senjata (*arms control groups*), Senator Amerika Serikat, *Human Right First* (HRF), *Human Right Watch* (HRW), Pusat Kebijakan Masyarakat Terbuka, Anggota Fraksi Demokrat**

Pada bulan September 2011, Amerika Serikat menunda penjualan senjata senilai \$53 juta ke Bahrain. Hal tersebut dilakukan setelah mendapat kritik tajam dari **kelompok hak asasi manusia dan anggota Kongres** terkait penjualan senjata, karena masih terjadi pelecehan dan kekerasan terhadap para pemrotes yang melawan pemerintah Bahrain.<sup>122</sup>

Sebelum terjadi pemblokiran penjualan senjata senilai \$53 juta kepada Bahrain. **Kelompok hak asasi manusia internasional dan kelompok kontrol senjata (*arms control groups*)**, semula melakukan desakan terhadap Kongres

---

<sup>121</sup> Toby C Jones, *Time to Disband the Bahrain-Based U.S Fifth Fleet*. Diakses dalam <https://www.theatlantic.com/international/archive/2011/06/time-to-disband-the-bahrain-based-us-fifth-fleet/240243/> (04/11/2017, 23.43 WIB).

<sup>122</sup> *US: Wrong Time for Bahrain Arms Deal*. Its Government Has Yet to Deliver on Accountability, Reforms. Diakses dalam <https://www.hrw.org/news/2012/02/08/us-wrong-time-bahrain-arms-deal> (06/11/2017, 01.37 WIB).

Amerika Serikat untuk melakukan pemblokiran tersebut, sampai dihentikannya tingkat kekerasan terhadap oposisi dan memulai reformasi yang serius.<sup>123</sup>

Anggota Kongres juga mendapati surat pada 28 September 2011 dari berbagai kelompok penting seperti, *Human Right First* (HRF), *Human Right Watch* (HRW), dan Pusat Kebijakan Masyarakat Terbuka, menegaskan Washington beresiko kehilangan kredibilitas banyak, terutama di dunia Arab, seperti kekuatan untuk kebebasan, jika penjualan senjata tersebut diloloskan. Dalam surat tersebut dikatakan, “Prioritisasi kepentingan keamanan atas reformasi politik ini sangat berbeda dengan deklarasi dukungan Presiden Barack Obama pada bulan Mei kepada mereka yang memprotes kebebasan di seluruh wilayah, ketika beliau berkata: “Jika anda mengambil resiko memaksimalkan reformasi, maka anda akan memiliki dukungan penuh dari Amerika Serikat.”<sup>124</sup>

Pandangan seperti di atas juga diperkuat dengan sebuah pernyataan dari salah seorang **Senator Amerika Serikat, Ron Wyden** terhadap media *The Cable* yang mengungkapkan bahwa, “Memberikan senjata kepada pemerintah yang secara aktif melakukan pelanggaran hak asasi manusia terhadap para pemrotes damai, tentu akan bertentangan dengan tujuan kebijakan luar negeri Amerika Serikat”. Dalam pandangannya tersebut, Wyden menambahkan, “Kita harus mempromosikan demokrasi dan hak asasi manusia di wilayah tersebut dan tidak menghargai rezim yang telah memenjarakan dan membunuh orang-orang yang

---

<sup>123</sup> Jim Lobe di Washington, *Bahrain: US Congress Urged to Reject Arms Sale to Bahrain*. Diakses dalam <http://www.ipsnews.net/2011/09/bahrain-us-congress-urged-to-reject-arms-sale/> (09/11/2017, 00.05 WIB).

<sup>124</sup> *Ibid.*,

memilih untuk protes secara damai dalam menentang pemerintah mereka. Resolusi seperti inilah yang akan mencegah Amerika Serikat dalam menyediakan persenjataan terhadap Kerajaan Teluk tersebut, hingga mereka menunjukkan komitmen nyata dalam menghormati hak asasi manusia.”<sup>125</sup>

Pernyataan dari Senator tersebut dapat dinilai, memberikan pasokan senjata terhadap Bahrain berarti sama saja dengan mendukung rezim yang telah melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia, dimana hal tersebut tentu sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai demokrasi yang selama ini tertanam dalam tubuh politik Amerika Serikat ketika menangani kasus pelanggaran HAM maupun proses demokratisasi yang selama beberapa dekade belakangan ini terjadi.

Dalam laman media online VOA yang dirilis pada tanggal 21 Mei 2012. Salah satu Ketua Komisi HAM di Kongres, **anggota DPR Fraksi Demokrat**, James McGovern dari negara bagian Massachusetts, beliau juga ikut mengecam kebijakan pemerintahan Obama yang berkenaan dengan Bahrain. Beliau mengungkapkan keprihatinannya, “Saya kecewa ketika mengetahui Jum’at (18/05/2012) lalu, pemerintah Obama akan melanjutkan kesepakatan penjualan senjata ke Bahrain, meskipun pelanggaran Hak Asasi Manusia masih terus berlangsung di negara itu, termasuk penggunaan kekerasan berlebihan oleh

---

<sup>125</sup> Josh Rogin, *Congress gears up to fight arms sales to Bahrain*. Diakses dalam [http://complex.beta.dev.foreignpolicy.com/posts/2011/10/05/congress\\_gears\\_up\\_to\\_fight\\_arms\\_sales\\_to\\_bahrain](http://complex.beta.dev.foreignpolicy.com/posts/2011/10/05/congress_gears_up_to_fight_arms_sales_to_bahrain) (08/11/2017, 14.00 WIB).

petugas keamanan dan penahanan para pemimpin oposisi serta pembela Hak Asasi Manusia,”ungkapnya.”<sup>126</sup>

Menurut hemat penulis, pernyataan pimpinan Komisi Hak Asasi Manusia tersebut merupakan salah satu bentuk protes dan juga penolakan atas kebijakan pemerintah Obama yang lebih mementingkan kelanjutan kesepakatan senjata dibandingkan dengan kondisi para pemrotes damai di Bahrain yang belum benar-benar mendapatkan keadilan dan perubahan reformasi yang serius.

Wyden dan James McGovern sebagai pejabat Senator dalam Kongres Amerika Serikat, mereka mengakui telah mengajukan sebuah resolusi yang menghalangi penjualan senjata ke Bahrain, yang berupa Humvee dan Rudal. Sebagian besar senator juga telah menulis surat kepada Hillary Clinton yang berisi secara tegas mengkritik pelanggaran Hak Asasi Manusia di Bahrain dan penolakan terhadap seruan reformasi. Mereka percaya bahwa penjualan senjata bukanlah hal yang tepat untuk menyelesaikan persoalan di Bahrain, namun hal tersebut akan semakin melemahkan dan memperburuk kredibilitas Amerika Serikat ditengah transisi demokratis di Timur Tengah.<sup>127</sup>

Sebagai anggota parlemen lama, Wyden dan Jim Mc Govern lebih mengutamakan pada promosi hak asasi manusia dan martabat, mereka mengaku kecewa terhadap keputusan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat dalam

---

<sup>126</sup> VOA, *Kongres AS Bahas Ancaman atas Masyarakat Madani di Dunia*. Diakses dalam <https://www.voaindonesia.com/a/kongres-as-bahas-ancaman-atas-masyarakat-madani-di-dunia/727457.html> (08/11/2017, 17.45 WIB).

<sup>127</sup> Robert Naiman, *Just Foreign Policy: Bahrain Arms Sales Delayed; Amnesty: US Weapons Used Again Arab Spring*. Diakses dalam <http://www.justforeignpolicy.org/node/1047> (11/11/2017, 02.20 WIB).

melanjutkan misi penjualan senjata ke Bahrain. Kedua pejabat tersebut menghimbau pada pemerintah Amerika Serikat, supaya aktifitas penjualan senjata tidak dilakukan dengan tujuan membantu rezim Bahrain. Keduanya sepakat memperkenalkan undang-undang untuk mengembalikan kebijakan yang diyakini keliru ini.<sup>128</sup>

Sebagian besar dari argumen yang telah dipertegas oleh para tokoh senator tersebut, tentu telah mewakili sejumlah pandangan dari mayoritas anggota parlemen. Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya kiriman surat dari setengah lusin senator Amerika Serikat terhadap Hillary Clinton yang mengkritisi seputar kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia maupun terhambatnya proses reformasi di Bahrain yang telah dijelaskan pada paragraf sebelumnya.

Para Senator dalam Kongres Amerika Serikat meyakini bahwa Amerika Serikat seharusnya hanya memulai jual beli senjata sebagai respon terhadap reformasi nyata, bukan represi yang terus merajalela. Dengan begitu Amerika Serikat memiliki kesempatan untuk mengambil langkah memajukan hak asasi manusia di wilayah ini. Kongres pun siap memanfaatkan momentum ini dan menyampaikan Rancangan Undang-undang (RUU) yang menyinggung tentang undang-undang bipartisan yang menghalangi penjualan atau pengiriman senjata tertentu terhadap Bahrain sampai pemimpin Bahrain menerapkan seutuhnya rekomendasi BICI (*Bahrain Independent Commission of Inquiry*).<sup>129</sup>

---

<sup>128</sup> *Rethink U.S Arm Sales to Bahrain*, diakses dalam <http://edition.cnn.com/2015/09/10/opinions/wyden-mcGovern-bahrain-arms-sales/index.html> (14/11/2017, 23.43 WIB).

<sup>129</sup> *Ibid.*,

